

---

**Optimalisasi Peran Intelijen Dalam Penanggulangan Potensi Ancaman Terorisme Maritim Di Selat Malaka**

Guruh Dwi Yudhanto<sup>1</sup>, Supriadi<sup>2</sup>, Yanuar Dwi Legowo<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Intelijen Negara

E-mail : [guruh.46@gmail.com](mailto:guruh.46@gmail.com)<sup>1</sup>, [sandi787989@gmail.com](mailto:sandi787989@gmail.com)<sup>2</sup>, [legowo88@gmail.com](mailto:legowo88@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT**

*The incident involving the attack on the twin towers of the World Trade Center in New York (9/11) brought the threat of terrorist attacks targeting the maritime sector to considerable attention. Much of the concern regarding maritime terrorist attacks in Southeast Asia in recent years has focused on the southern portion of the Malacca Strait and Singapore. Even though to date there has never been any maritime terrorism in the Malacca Strait, this does not eliminate the potential threat. Indonesia, as an archipelagic country, needs intelligence and maritime intelligence cooperation, especially in countering maritime terrorism. This research will examine optimizing the role of intelligence in dealing with the threat of maritime terrorism in the Malacca Strait. The approach used is a qualitative approach. The research results show that the potential threat of maritime terrorism in the Malacca Strait is caused by several factors, such as economics, politics and geographical location. The role of intelligence includes collecting accurate and reliable information, carrying out appropriate intelligence analysis, and providing early warning of emerging threats. Apart from that, intelligence also needs to strengthen cooperation with national and international intelligence partners to increase intelligence capabilities in dealing with potential threats of maritime terrorism in the Malacca Strait.*

**Keywords:** *Circulation of Counterfeit Money, Prevention Strategy, Inflation.*

**ABSTRAK**

Peristiwa penyerangan menara kembar World Trade Center di New York (9/11) membuat ancaman serangan teroris yang menasar sektor maritim mendapat perhatian yang cukup besar. Sebagian besar kekhawatiran mengenai serangan teroris maritim di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir terfokus pada bagian selatan Selat Malaka dan Singapura. Meskipun hingga saat ini belum pernah terjadi terorisme maritim di Selat Malaka, namun tidak menyingkirkan potensi ancamannya. Indonesia sebagai negara kepulauan, membutuhkan intelijen dan kerjasama intelijen maritim, khususnya dalam penanggulangan terorisme maritim. Penelitian ini akan mengkaji tentang optimalisasi peran intelijen dalam menghadapi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, politik, dan letak geografis. Adapun peranan intelijen di antaranya melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terpercaya,

melakukan analisis intelijen yang tepat, dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman yang muncul. Selain itu, intelijen juga perlu memperkuat kerjasama dengan mitra intelijen nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan intelijen dalam menghadapi potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka.

**Kata Kunci:** Peredaran Uang Palsu, Strategi Pencegahan, Inflasi.

### PENDAHULUAN

Peristiwa penyerangan menara kembar World Trade Center di New York (9/11) membuat ancaman serangan teroris yang menasar sektor maritim mendapat perhatian yang cukup besar, baik di media internasional maupun di forum internasional seperti *International Maritime Organisasi* (IMO). Dibandingkan dengan sektor penerbangan, dimana keamanan segera meningkat secara signifikan setelah 9/11, sektor maritim tampaknya memberi teroris banyak sasaran empuk. Meskipun berbagai tindakan telah diterapkan untuk meningkatkan keamanan maritim, tampaknya masih lebih mudah bagi teroris untuk membajak kapal daripada pesawat terbang (Amirell, 2020).

Pembajakan politik dan terorisme maritim merupakan dua fenomena yang sulit dipisahkan dari pembajakan biasa atau non politik. Namun demikian, tetap perlu dibedakan mengingat perbedaan ini berguna, pada tingkat teoretis, untuk mengidentifikasi karakteristik utama dari berbagai ancaman yang saat ini ditimbulkan oleh kejahatan maritim dan terorisme. Baik pembajakan politik maupun terorisme maritim dapat dilihat sebagai sub-kategori khusus pembajakan yang didefinisikan secara luas. Pembajakan ini berbeda dari sebagian besar bentuk pembajakan pada umumnya, karena

pada prinsipnya dilakukan untuk tujuan publik, bukan pribadi (Menefee, 1986). Dengan demikian, kriteria utama untuk mendefinisikan pembajakan politik berkisar pada masalah motif, yaitu pembajakan tidak dilakukan untuk tujuan keuntungan ekonomi pribadi, melainkan untuk tujuan menghasilkan dana untuk perjuangan politik, ideologi atau agama, biasanya pemberontakan bersenjata.

Sama seperti pembajakan politik, tindakan terorisme maritim dilakukan untuk mempromosikan tujuan politik, ideologis, atau agama. Namun, apa yang membedakan terorisme maritim dari politik dan bentuk pembajakan lainnya adalah fokus pada kekerasan sebagai sarana untuk menciptakan malapetaka atau menimbulkan ketakutan pada populasi atau masyarakat umum. Berbeda dengan bentuk perompakan lainnya, yang motifnya didorong oleh ekonomi, tujuan terorisme maritim adalah kekerasan yang menjadi penyebab serangan tersebut (Coady, 2004). Sebagai contoh, menurut Amirell (2020) insiden pembajakan yang terjadi di Selat Malaka dalam tiga sampai lima tahun terakhir dan mengalami peningkatan, paling tepat disebut sebagai “pembajakan politik” yang dilakukan oleh anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka). GAM merupakan sebuah kelompok/organisasi berdiri pada tahun 1976

ini telah melakukan perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Aceh dari pemerintah pusat Indonesia, dan perompakan, termasuk penculikan awak kapal untuk tebusan, disinyalir menjadi sumber pendanaan untuk perjuangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya untuk beberapa bagian dari organisasi.

Menurut Biro Maritim Internasional (IMB), insiden pertama yang dilaporkan melibatkan penculikan untuk tebusan di lepas pantai Aceh terjadi pada tanggal 25 Juni 2001. Kapal tanker MT Tirta Niaga IV berbendera Indonesia telah berlabuh di lepas pantai barat Aceh untuk melakukan perbaikan mesin ketika sekelompok perompak naik ke kapal dan menjarah kapal, uang tunai dan barang berharga. Para perompak kemudian menculik nakhoda dan perwira kedua dan membawa mereka ke darat. Perwira kedua dibebaskan beberapa hari kemudian setelah negosiasi, tetapi nakhoda disandera selama lebih dari enam bulan sebelum dibebaskan, kabarnya setelah uang tebusan sebesar US\$30.000 dibayarkan (IMB, 2002; Burnett, 2002). Serangan terhadap Tirta Niaga IV tampaknya di awal merupakan serangan oportunistik oleh penduduk desa pesisir tanpa bukti keterlibatan GAM. Namun, dua bulan kemudian, pada akhir Agustus 2001, MV Ocean Silver diserang oleh sekelompok perompak bersenjata senjata dan pelontar granat saat melewati pantai timur Aceh di bagian utara Selat Malaka. Enam awak, termasuk nakhoda, dibawa ke darat dan disandera. Enam awak yang tersisa ditinggalkan di kapal selama tiga hari sebelum diselamatkan oleh kapal angkatan laut Indonesia. Para perompak dilaporkan meminta uang tebusan sebesar US\$34, 000

dari pemilik kapal sebagai “sumbangan dana” bagi perjuangan kemerdekaan Aceh (Amirell, 2020).

Sementara itu, sebagian besar kekhawatiran mengenai serangan teroris maritim di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir terfokus pada bagian selatan Selat Malaka dan Singapura. Ada dua alasan utama untuk ini. Pertama, jelas bahwa kawasan ini memiliki kepentingan strategis utama sebagai penghambat perdagangan maritim internasional. Sebuah serangan yang memblokir Selat Malaka akan memaksa kapal untuk mengambil jalan memutar di sekitar pantai barat Sumatera, sesuatu yang akan memiliki konsekuensi ekonomi yang besar, tidak terkecuali Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Kedua, ancaman pembajakan “kecil-kecilan”, yang selama dua puluh lima tahun terakhir menjadi masalah keamanan yang relatif kecil untuk kapal komersial di bagian selatan Selat, tampaknya, setidaknya bagi beberapa pengamat, mengindikasikan risiko yang lebih besar bagi serangan teror terhadap kapal komersial yang transit. Anggapan yang muncul adalah para perompak yang sering menyerang kapal niaga dengan tujuan merampok, mungkin mendapatkan ide untuk melakukan serangan teroris, misalnya dengan menenggelamkan kapal atau menggunakannya sebagai bom apung terhadap kota pelabuhan utama (Amirell, 2020).

Asumsi seperti itu mungkin tampak dibuat-buat, namun sejumlah perkembangan setelah serangan 9/11 menunjukkan bahwa teroris internasional telah mengembangkan rencana untuk menyerang Selat Malaka. Beberapa bukti tampak agak lemah, seperti video, yang ditemukan oleh pasukan

Amerika di Afghanistan pada tahun 2001, yang menunjukkan pergerakan kapal angkatan laut Malaysia, atau tuduhan tidak berdasar, yang dilaporkan oleh *The Economist* dan media berita terkemuka lainnya pada tahun 2003, bahwa teroris telah membajak sebuah kapal tanker kimia di Selat Malaka untuk berlatih navigasi, menunjukkan bahwa para teroris tampaknya memang sedang membuat rencana untuk melancarkan serangan teroris maritim di kawasan Selat Malaka (Amirell, 2020).

Pada saat yang sama, serangan terhadap kapal tanker minyak *Prancis Limburg*, pada 2002, di lepas pantai Yaman Limburg menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan bahwa teroris di wilayah tersebut akan mencoba melakukan serangan teroris maritim di Selat Malaka (Fort, 2020). Jika informasi terkini dari sumber-sumber intelijen, seperti diberitakan di media, dapat dipercaya, maka skenario seperti itu mungkin lebih mungkin terjadi daripada yang dibayangkan sebelumnya (Amirell, 2020). Pada Agustus 2004, Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia saat itu, Abdullah Makhmud Hendropriyono, mengatakan bahwa para agen senior *Jama'ah Islamiyyah* (JI) dalam tahanan telah mengakui bahwa serangan terhadap pelayaran di Selat Malaka telah direncanakan di masa lalu (Hendropriyono, 2004). Sekitar waktu yang sama juga dilaporkan bahwa para pejabat intelijen AS telah menyadap komunikasi antara para aktivis JI yang mengungkapkan rencana untuk merebut sebuah kapal di daerah tersebut menggunakan perompak lokal. Kapal tersebut diduga telah dipasang bahan peledak dan diarahkan ke kapal lain, diledakkan di pelabuhan atau digunakan

untuk mengancam jalur laut yang sibuk di daerah tersebut (Amirell, 2020).

Meskipun hingga tahun 2022 ini fakta menunjukkan bahwa serangan semacam itu belum pernah dilakukan di Selat Malaka, tidak menyingkirkan potensi ancamannya. Sependapat dengan hal tersebut, Ho (2006) menyatakan bahwa letak strategis dan peran Selat Malaka yang menjadi perairan penting bagi perdagangan dunia, muncul kekhawatiran isu-isu keamanan maritim seperti pembajakan atau perampokan bersenjata, konflik bersenjata internal, kecelakaan kapal, bencana lingkungan dan terorisme maritim. Ditambah lagi dengan fakta bahwa kelompok teroris menganggap pelabuhan laut dan jalur pelayaran internasional seperti Selat Malaka sebagai target yang menarik, karena mereka terletak di persimpangan antara tujuan, kemampuan, dan peluang teroris (Campbell & Gunaratna, 2003).

Dalam upaya mengamankan Selat Malaka, sebagian besar negara pesisir telah melakukan beberapa inisiatif kerjasama seperti *Malacca Security Strait Initiatives 2004* (Malsindo, EIS dan IEG), *Cooperative Mechanism Singapura 2007*, *Meeting of the Chiefs of Defense Forces*, *ASEAN Regional Forum*, *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (Recaap). Tetapi dalam realitanya, segala hal yang telah di upayakan tersebut belum terlaksana secara maksimal. Beberapa kelemahan yang masih terdapat di antaranya adalah kurangnya kerjasama antara Angkatan Laut dari negara-negara tetangga serta kurangnya regulasi yang mengatur kerjasama yang baik antara negara-negara tetangga, negara pesisir, dan negara pengguna (Bateman, 2007). Dengan prinsip

non-intervensi, negara-negara pesisir terikat pada mekanisme kolektif untuk mengurus urusan masing-masing. Namun, perlu diingat bahwa batas wilayah adalah topik sensitif bagi negara-negara pesisir karena adanya persaingan klaim atas sumber daya lepas pantai dan kekhawatiran terhadap kekuatan eksternal di wilayah tersebut. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana negara-negara pesisir merespons ancaman-ancaman di Selat Malaka, seperti membatasi patroli pengamanan yang dilakukan hanya pada yurisdiksi teritorial mereka sendiri.

Sementara itu, untuk Indonesia sendiri, domain maritim merupakan domain yang amat penting. Sejalan dengan pernyataan Laksamana TNI Agus Suhartono, sebagai salah satu negara berbentuk kepulauan yang paling besar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam domain maritim. Mengenai hal tersebut laut mempunyai banyak makna bagi masyarakat Indonesia, seperti sebagai media transportasi, media kesejahteraan, dan media pertahanan (Suhartono, 2010). Hal ini tentunya membuat penjagaan terhadap kepentingan maritim dari segala ancaman dan gangguan, dalam hal ini terorisme maritim merupakan prioritas di Selat Malaka yang merupakan bagian dari ALKI (Arus Laut Kepulauan Indonesia).

Selain itu, sebagai negara yang berpengaruh di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang harus dilindungi dari ancaman-ancaman maritim. Oleh karena itu, dengan bentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, sangat penting untuk dikembangkannya strategi dalam hal keamanan maritim dan memiliki intelijen di bidang maritim yang memadai. Meskipun secara umum dipahami bahwa intelijen maritim adalah bagian penting dari

keamanan maritim, namun pada kenyataannya terdapat ketidakpedulian dari banyak pihak (*stakeholders*) terhadap kebutuhan akan intelijen maritim, sehingga hanya TNI Angkatan Laut yang melakukan pengembangan terhadap sebagian domain tersebut. (Mangindaan, 2022).

Intelijen didefinisikan dalam kamus Webster sebagai pengetahuan tentang musuh, sedangkan menurut Sherman Kent - *intelligence is the knowledge which our highly placed civilians and military men must have to safeguard the national welfare* (Kent, 1965). Pengetahuan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu strategis serta taktis. Terutama bagi Angkatan Laut, menjadi sebuah keharusan untuk menguasai intelijen operasi yang berisi penggabungan dari berbagai intelijen taktis, seperti untuk mendukung operasi perang kapal selam, kapal permukaan, amfibi, dan sebagainya (Mangindaan, 2022).

Inti dari intelijen adalah pemahaman yang berkaitan dengan ancaman dan terdiri atas tiga unsur yang dikalikan bersama, yaitu keadaan atau situasi yang mendukung (*circumstance*), niat (*intention*), dan kemampuan (*capability*) (Lyod & Lorenzini, 1986). Dari pemahaman tersebut, terlihat bahwa ancaman menjadi hilang atau tiada jika salah satu unsurnya bernilai nol, imbas dari perkalian antara ketiga unsur tersebut. Berkaitan dengan ancaman terorisme maritim, perlu dikembangkan kerjasama intelijen maritim. Hal ini sejalan dengan pendapat AA Kustia Sukarnaprawira (2007) yang menyatakan bahwa perang melawan terorisme bersifat asimetris dan membutuhkan semua instrument kekuatan nasional, baik politik, hukum, ekonomi, militer dan intelijen.

Sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memiliki intelijen maritim yang dapat memberikan informasi aktual dan spesifik terkait masalah keamanan laut yang kian kritis, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme maritim. Di sisi lain, dalam usaha membangun Indonesia sebagai negara maritim, diperlukan upaya pengembangan keamanan melalui *counter intelligence* yang semakin penting untuk menghadapi ancaman yang ada (Mangindaan, 2022). Menurut hukum internasional dan nasional yang berlaku, penanganan terorisme maritim masuk ke dalam ranah hukum militer. Hal ini juga sesuai dengan lokasi serangan teror yang dapat bersifat dinamis seperti kapal, atau statis seperti kilang minyak di tengah laut. (Hariyanto, 2017). Selain itu, untuk menghadapi ancaman terorisme yang potensial dan berskala besar, fungsi peringatan dini dari intelijen sangat penting sebelum aksi teror terjadi (Sukarnaprawira, 2007). Secara normatif, penanggulangan terorisme di Indonesia sudah diakomodasi melalui pengesahan instrumen regional, seperti ASEAN *Convention on Counter Terrorism dan Trilateral Cooperative Arrangement*. Di level nasional, Indonesia sudah mengundang Perpu Terorisme dan perubahannya serta PP Nomor 13 Tahun 2022 tentang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia. Indonesia juga menerapkan standar keamanan pelayaran pelabuhan, seperti melalui penerapan ISPS Code dan kewajiban pemasangan sistem identifikasi kapal otomatis. Namun, penanggulangan terorisme maritim di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan secara praktis, di antaranya,

ketidaktegasan pembagian yurisdiksi institusi penegak hukum di laut, kurang optimalnya koordinasi antar institusi untuk pengamanan laut, dan kurang berkembangnya sarana, prasarana, serta sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk pengamanan laut (Siswandi, 2022).

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam riset ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan melalui wawancara dengan informan dan sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi dilakukan dengan menggunakan pedoman buku, jurnal, maupun karya tertulis lainnya sebagai landasan teori untuk menemukan optimalisasi peran intelijen dalam penanggulangan potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Potensi Ancaman Terorisme Maritim di Selat Malaka**

Selat Malaka adalah jalur maritim strategis dan sangat penting bagi perdagangan internasional. Selain memiliki nilai strategis dari segi ekonomi, Selat Malaka juga menghadapi masalah keamanan seperti tindakan perompakan di laut yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional dari negara-negara pantai seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, serta merugikan negara-negara yang menggunakan Selat Malaka. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi target empuk bagi kelompok teroris karena wilayah tersebut juga merupakan tempat bagi banyak kapal pesiar dan kapal kargo, yang dapat menjadi sasaran bagi kelompok teroris untuk

melakukan serangan. Tidak hanya itu, Selat Malaka juga menjadi tempat pelarian bagi kelompok teroris yang ingin melarikan diri dari pengejaran dan penangkapan oleh pihak keamanan. Terdapat juga potensi aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok yang berasal dari negara-negara lain di sekitar Selat Malaka.

Menurut *International Maritime Bureau* (IMB), persentase kejadian perompakan di laut secara global cenderung meningkat, terutama di wilayah Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan perairan Asia Timur. Selat Malaka juga merupakan wilayah dengan tingkat serangan terhadap kapal serta kekerasan maritim terbesar di dunia menurut laporan IMB. Permasalahan ini terjadi karena pengamanan laut dari negara-negara pantai di sekitarnya yang lemah.

Menurut laporan IMB, Selat Malaka pada tahun 2002-2003 merupakan jalur pelayaran paling rawan dan menjadi hot spot keamanan maritim dunia karena meningkatnya kasus perompakan. Pada tahun 2005, IMO juga mencatat bahwa Selat Malaka menyumbang 40% dari jumlah kasus perompakan global dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD 3 juta. Tindakan perompakan ini tidak hanya merugikan para pelaku transaksi tetapi juga dapat mengancam keselamatan para pelaut, menyebabkan peningkatan biaya asuransi, pembatasan perdagangan bebas dan meningkatkan ketegangan antara negara pantai. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai Selat Malaka harus memperhatikan masalah keamanan maritim karena dapat mengganggu hubungan internasional serta mengancam keselamatan maritim dan keamanan nasional. Karena itu,

keamanan maritim harus menjadi tanggung jawab semua negara untuk menjaga laut dari segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap berbagai aktivitas pengguna dan pemanfaatan laut.

Tindak perompakan yang mengancam keamanan maritim di Selat Malaka dapat berdampak pada hubungan antara negara pengguna dan negara pantai. Indonesia memiliki dua kepentingan di Selat Malaka, yaitu legalitas kedaulatan dan pertahanan serta keamanan, serta memiliki wilayah yang lebih luas daripada Malaysia dan Singapura di Selat Malaka. Selat Malaka sangat penting bagi Malaysia dalam pertumbuhan ekonominya karena terdapat aktivitas perdagangan, nelayan, dan pelabuhan kontainer serta tempat pariwisata yang memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara. Sedangkan bagi Singapura, Selat Malaka berguna untuk memajukan aspek maritimnya dan menjadi pusat transportasi global karena memiliki pelabuhan tersibuk di dunia dan banyak kapal yang bersandar setiap harinya.

Negara pengguna seperti Tiongkok dan Jepang sangat tergantung pada Selat Malaka karena merupakan satu-satunya jalur terpendek untuk mengimpor bahan bakar minyak dari negara Timur Tengah. Hampir 60% impor minyak Tiongkok dan sekitar 90% barang impor Jepang melalui Selat Malaka, sehingga Selat Malaka harus aman dari gangguan yang dapat mengganggu pasokan energi bagi kedua negara tersebut. Kedua negara tersebut sedang gencar membangun industri nasional mereka, sehingga Selat Malaka sangat vital bagi kepentingan ekonomi mereka.

Selat Malaka terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia,

Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia), dan merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi dan kedaulatan Indonesia. Kondisinya sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan internasional dan minyak dunia yang sangat penting, dengan hampir separuh perdagangan dunia yang dilakukan melalui jalur laut melewati kawasan ini. Oleh karena itu, masalah keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka menjadi tanggung jawab Negara Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki kuasa atas selat Malaka serta negara lainnya yang sering menggunakan dan memiliki kepentingan di sana. Jika keamanan dan keselamatan pelayaran terjamin, maka akan meningkatkan perekonomian dunia dan meningkatkan perekonomian negara-negara yang memiliki kuasa dan batas wilayah di Selat Malaka, termasuk Indonesia.

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Setiap tahun, sekitar 50.000 kapal melintasi Selat Malaka, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan perdagangan laut dunia. Selat Malaka memiliki nilai strategis yang sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan atau Samudera Pasifik, dan memiliki kepentingan banyak negara di sana, baik dari segi peperangan dan proyeksi kekuatan militer, kepentingan komersial dan perdagangan maritim, maupun eksploitasi ekonomi sumber daya laut. Negara-negara besar yang menjadi aktor ekstra regional dan pengguna Selat memiliki kepentingan besar pada dua faktor pertama, sementara negara-negara pantai Selat Malaka lebih fokus pada faktor yang ketiga.

Selat Malaka, yang memiliki panjang sekitar 900 mil laut, merupakan kawasan yang sangat penting untuk stabilitas keamanan dan perekonomian nasional maupun global. Ancaman kejahatan di Selat Malaka umumnya berupa pembajakan, perampokan, penculikan awak kapal, perdagangan manusia, dan penyelundupan senjata. Selain itu, ada juga kemungkinan serangan terorisme yang bertujuan untuk mengganggu arus perdagangan internasional dan merusak fasilitas perhubungan laut di Selat Malaka.

Isu ketidakamanan Selat Malaka dan ancaman serangan terorisme maritim yang bertujuan melumpuhkan arus perdagangan internasional dan merusak fasilitas perhubungan laut di perairan Selat Malaka, menyebabkan masalah kejahatan terhadap kapal menjadi sangat kompleks terutama bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Selat Malaka selama ini dianggap sebagai "surga" dan tempat yang ideal untuk melakukan kejahatan di laut karena merupakan jalur yang sangat sibuk dan digunakan sebagai jalur pengapalan energi oleh negara-negara maju. Pada awalnya, aksi kejahatan di laut dipicu oleh faktor ekonomi, namun saat ini perlu dipertimbangkan dalam konteks tindakan kekerasan yang lebih luas di laut. Fenomena perompakan harus diperhatikan karena semakin mungkin terjadinya ancaman terorisme yang berasal dari masalah non-ekonomi (ideologi), yang dapat melibatkan kapal di laut.

Mayoritas perompak maritim melakukan upaya pencurian barang atau uang yang dapat diperoleh dari kapal dengan menggunakan senjata dan tindakan kekerasan untuk memaksa kapal untuk menyerah. Mereka kemudian mengambil

barang dari kapal untuk dijual kembali atau menawan awak kapal dan menuntut tebusan. Fakta bahwa perompakan menjadi semakin ganas dengan penggunaan senjata yang lebih canggih, hingga menimbulkan cedera dan kematian pada awak kapal yang diserang, telah memperluas cakupan keamanan maritim. Dengan demikian, antara terorisme di laut dengan serangan perompakan pada dasarnya, terutama karena telah terjadi peningkatan jumlah pembajakan dalam insiden perompakan.

Sementara itu, kejadian yang dapat dikategorikan sebagai terorisme di laut yang pertama adalah peristiwa Achille Lauro bulan Oktober 1985. Achille Lauro merupakan kapal pesiar berbendera Italia yang dibajak di laut lepas oleh empat orang Palestina yang menyandera awak dan penumpang, dan mengancam akan meledakkan kapal jika ada operasi penyelamatan yang dilakukan. Seorang penumpang tewas ketika permintaan mereka untuk pembebasan lima puluh tahanan Palestina oleh Israel tidak dipenuhi. Peristiwa ini masuk ke dalam kategori aksi terror karena motifnya adalah politik, peperangan antara Palestina dengan Israel yang dilatarbelakangi oleh agama.

Selain melihat potensi sumber daya alam yang melimpah di Selat Malaka dengan beragam jenis ikan juga posisi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional, kelompok teroris dapat memanfaatkan hal tersebut untuk mengumpulkan dana dengan mencuri muatan kapal dagang, melakukan *illegal fishing*, atau menyandera awak dan penumpang untuk tebusan, atau bahkan hanya untuk sekedar menimbulkan terror dengan tujuan lebih besar mengacaukan stabilitas keamanan global. Ada juga potensi dimana Selat Malaka menjadi jalur pelarian

atau persembunyian bagi para teroris yang ingin menghindari atau melarikan diri dari kejaran pihak keamanan. Perlu diwaspadai juga aksi terorisme dari kelompok teror negara-negara lain yang ada di sekitar Selat Malaka.

### **Peran Intelijen Dalam Pendeteksian, Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Terorisme di Selat Malaka**

Terdapat empat alasan utama untuk melihat hubungan antara perompakan dan terorisme maritim, yaitu berdasarkan pada implikasi dari kedua ancaman tersebut terhadap keamanan global; taktik dan pendekatan atau modus operandi yang digunakan; kesamaan gudang senjata yang digunakan untuk mencapai tujuannya (pembajakan kapal); dan, meningkatnya penggunaan kekerasan. Namun, hambatan utama bagi kesamaan dan hubungan yang dirasakan antara bajak laut dan teroris yang sangat dijunjung tinggi oleh antagonis dari perspektif ini adalah motif yang berbeda dari bajak laut dan teroris. Terorisme berbeda dari pembajakan secara langsung. Pembajakan adalah kejahatan yang dimotivasi oleh keserakahan, dan dengan demikian didasarkan pada keuntungan finansial. Terorisme dimotivasi oleh tujuan politik di luar tindakan langsung menyerang atau membajak target maritim. Faktor pendorong teroris umumnya adalah ideologi politik yang berasal dari ketidakadilan yang dirasakan, baik historis maupun kontemporer.

Pasal 3 Konvensi SUA 1988 digunakan sebagai definisi operasional untuk terorisme maritim. *The International Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against The Safety Maritime Aliigation* 1988 atau Konvensi Internasional untuk Pemberantasan

Tindak Pidana Terhadap Keselamatan Pelayaran Laut 1988 memberikan definisi yang lebih luas mengenai tindakan yang dianggap membahayakan keamanan pelayaran laut. Di dalamnya disebutkan bahwa tindakan yang dianggap membahayakan keselamatan pelayaran di antaranya adalah mengambil alih atau mengendalikan kapal dengan cara kekerasan atau ancaman atau bentuk intimidasi lainnya, melakukan kekerasan terhadap orang lain yang berada di atas kapal, merusak atau menghancurkan kapal atau kargo, menyebabkan kerusakan serius pada fasilitas navigasi laut di atas kapal, serta membunuh seseorang untuk tujuan yang membahayakan keselamatan kapal dan pelayarannya.

Tidak adanya aturan khusus tentang terorisme maritim mungkin berasal dari fakta bahwa 'terorisme di laut tidak pernah menjadi masalah internasional yang serius, berbeda dengan perompakan dan perampokan bersenjata. Meskipun demikian, mengingat potensi ancaman terorisme maritim khususnya di Selat Malaka tetap ada, maka Intelijen tetap perlu melakukan pendeteksian, pencegahan dan penanggulangan ancaman tersebut. Dalam mencegah potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka, Intelijen harus memiliki basis data yang lengkap terkait kejahatan-kejahatan yang terjadi di Selat Malaka. Intelijen juga dapat memberdayakan Babinpotmar yang bertugas di wilayah tersebut. Menurut Letkol Marinir Aribowo Agus P, salah satu kemampuan Babinpotmar adalah deteksi dini berbagai bentuk kerawan termasuk potensi ancaman terorisme maritim. Babinpotmar atau Bintara Pembina Potensi Maritim sesuai dengan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Kep Kasal No

Kep/776/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembentukan BABINPOTMAR, adanya Babinpotmar merupakan upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilaksanakan dalam rangka menyiapkan potensi nasional aspek maritim menjadi kekuatan pertahanan guna mendukung tercapainya tugas TNI AL dalam OMP maupun OMSP. Babinpotmar dalam menjalankan tugasnya harus memiliki **Kemampuan Potensi Maritim**. Kemampuan potensi maritim adalah kemampuan dasar yg harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI AL khususnya Babinpotmar dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan potensi maritim yang meliputi kemampuan **Memiliki Jiwa Maritim** yaitu kemampuan untuk memahami seluruh aspek kehidupan batin manusia yang terdiri dari perasaan, pikiran dan angan-angan yang diarahkan menjadi kekuatan pertahanan negara dalam rangka melaksanakan tugas TNI AL; **Deteksi Dini** yaitu kemampuan setiap personil TNI AL untuk mengenali secara dini setiap bentuk kerawan berbentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang berpotensi mengarah pada konflik sosial dan mitigasi bencana. **Kemampuan Pemahaman Kondisi Sosial dan Budaya** yaitu kemampuan dalam memahami kondisi sosial dan dinamika politik daerah dan situasi politik nasional sehingga mampu memberikan suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemampuan potensi maritim yang dimiliki oleh Babinpotmar mendukung Intelijen dalam pengumpulan data secara komprehensif karena tidak hanya berdasarkan sudut pandang pertahanan dan

keamanan, tetapi juga dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berada di wilayah sekitar Selat Malaka. Hal ini sejalan dengan dalam proses pengumpulan data, intelijen juga perlu mencari data dari berbagai pihak, baik intelijen berbagai instansi di Indonesia maupun intelijen internasional. Terdekat, Intelijen harus dapat memperoleh data dari negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Inovasi berupa pengembangan sistem informasi maritim yang terintegrasi juga diperlukan.

Di samping itu, intelijen perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai bagian dari peningkatan pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di laut. Dikarenakan ancaman atau potensi ancaman di Selat Malaka adalah terorisme maritim, maka Intelijen juga perlu menyiapkan kontra terornya. Kontra terorisme untuk ancaman terorisme maritim dapat dilakukan melalui kerjasama dengan negara lain, secara bilateral maupun multilateral.

TNI AL Indonesia pernah melakukan simulasi kontra teror terkait terorisme maritim yaitu pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Koarmada II di Kawasan Megamas Pantai Manado. Dalam simulasi tersebut, telah terjadi pembajakan oleh kelompok teroris dan ada penyanderaan. Selain itu, Pasukan Koarmada 1 TNI AL juga menggelar simulasi anti teror penanganan terorisme di Dermaga JICT Pelabuhan Tanjung Priok pada November 2019. Simulasi ini bertujuan untuk melatih pengamanan objek vital di wilayah kemaritiman dari bahaya ancaman terorisme, khususnya terorisme maritim. Dalam konteks bilateral, di tahun 2018 Indonesia juga pernah

melakukan latihan kontra terorisme gabungan dengan Singapura. Meskipun penyelenggaraan latihan itu sendiri rutin, versi tahun 2018 ini menampilkan penggabungan serial kontraterorisme maritim untuk pertama kalinya. Perkembangan tersebut merupakan bukti meningkatnya penekanan pada bidang ini baik dalam hubungan pertahanan bilateral maupun di kawasan yang lebih luas. Angkatan laut kedua negara saling berbagi informasi dan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran domain maritim, perencanaan operasional bersama untuk memfasilitasi respons yang efektif untuk kontinjensi keamanan maritim regional dan kolaborasi selama serial untuk mengerahkan aset angkatan laut untuk mengganggu simulasi serangan teror yang mengancam pengiriman komersial.

### **KESIMPULAN**

Potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena Selat Malaka adalah salah satu jalur pelayaran yang sangat penting di dunia dan memiliki nilai geopolitik yang sangat vital sebagai jalur laut terpendek antara Samudera Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudera Pasifik. Jalur ini tidak hanya memiliki nilai strategis bagi negara pantai, tetapi juga bagi negara pengguna. Ada tiga faktor yang menjadi kepentingan banyak negara di Selat Malaka, yaitu perang dan proyeksi kekuatan militer di seluruh dunia, kepentingan komersial dan perdagangan maritim, serta eksploitasi sumber daya laut secara ekonomi.

Adapun peranan intelijen dalam pendeteksian, pencegahan dan penanggulangan potensi ancaman terorisme

di Selat Malaka sangat penting. Intelijen melakukan pengumpulan informasi yang akurat dan terpercaya, baik melalui pemberdayaan Babinpotmar maupun kerjasama dengan lembaga intelijen nasional dan internasional, melakukan analisis intelijen yang tepat, dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman yang muncul. Selain itu, intelijen juga perlu memperkuat kerjasama dengan mitra intelijen nasional dan internasional untuk meningkatkan kemampuan intelijen dalam menghadapi potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka. Selain itu, intelijen melalui analisis intelijen dapat membantu dalam mengatasi potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka. *Early detection, forecasting, early warning, dan problem solving* merupakan kerangka pemikiran yang dapat digunakan untuk membantu intelijen dalam menghadapi potensi ancaman terorisme maritim di Selat Malaka. Berdasarkan *early detection*, intelijen dapat mendeteksi ancaman dengan cepat dan akurat. Melalui *forecasting*, intelijen dapat memprediksi ancaman yang akan muncul di masa depan. *Early warning* membuat intelijen dapat memberikan peringatan dini terhadap ancaman yang muncul. Adapun melalui *problem solving*, intelijen dapat memberikan solusi terhadap ancaman yang muncul

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirell, Stefan Eklöf. (2020). Political Piracy and Maritime Terrorism: A Comparison between the Straits of Malacca and the Southern Philippine. In Graham Gerard Ong-Webb (Ed.), *Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Anggie, Pratiwi Putri Yunda (2019) *Upaya Indonesia Dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka*. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Anwar, D.F. (2014). *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*. Jakarta: LIPI.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bateman, Sam. (2007). *Building Good Order at Sea in Southeast Asia: The promise of international regimes*. In Kwa Chong Guan and John K. Skogan (Ed). *Maritime Security in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Burnett, John S. (2002). *Dangerous Waters: Modern Piracy and Terror on the High Seas*. New York: Plume. p. 324.
- Campbell, Tanner and Gunaratna, Rohan. (2003). "Maritime Terrorism, Piracy and Crime," in *Terrorism in the Asia Pacific: Threat and Response*, ed. Rohan Gunaratna Singapore: Eastern Univ. Press
- Chalk, Peter. (2008). *The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States*. RAND Corporation.
- Fink, Steven. *Crisis Management Planning for The Inevitable*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1986.
- Fort, Brian. (2020). Transnational Threats and the Maritime Domain. In Graham Gerard Ong-Webb (Ed.), *Piracy, Maritime Terrorism and Securing the Malacca Straits*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Hoffman, Bruce. 1998. *What is Terrorism*, dalam Art, R. & Jervis, R. 2009. *International Politics: Enduring*

- Concepts and Contemporary Issues, 9<sup>th</sup> Ed.* New York: Pearson-Longman
- Mangindaan, Robert. 2014. *Intelijen Maritim dan Upaya Memperkokoh Keamanan Maritim Indonesia*. Jakarta: CreateSpace Independent Publishing Platform; 1st edition (Sept. 2 2014)
- Manullang, A.C. (2014). *Terorisme dan Perang Intelijen*. Jakarta: Manna Zaitun.
- Menefee, Samuel P. (1986). “*Terrorism at Sea: The Historical Development of an International Legal Response*”, in *Violence at Sea*, edited by Eric F. Ellen (Paris: ICC Publishing S.A., 1986), p. 192.
- Miles, Edward L. (2000) *The New Ocean Regime: Facilitating Implementation, Compliance and Evolution*. In David Wilson and Dick Sherwood (Ed). *Oceans Governance and Maritime Strategies*. New South Wales: Allen & Unwin
- Philips, V.J. (2013). Isu Terorisme dan Human Security, Implikasi Terhadap Studi Kebijakan Keamanan Global, *Jurnal Ilmu Politik FISIP UI, Depok*.
- Raymond, Catherine Zara. (2007). *Piracy in the waters of Southeast Asia*. In Kwa Chong Guan and John K. Skogan (Ed). *Maritime Security in Southeast Asia*. New York: Routledge.
- Richardson, Michael. (2004). *A Time Bomb for Global Trade: Maritime-Related Terrorism in the Age of Weapons of Mass Destruction*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Roell, Peter. (2009). *Maritime Terrorism – A Threat to World Trade?*. ISPSW Institut für Strategie- und PolitikSicherheits- und Wirtschaftsberatung, Berlin, Germany.
- Saronto, Y. Wahyu & Jasir Karwita, *Teori Intelijen dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Ekalaya Saputra: 2001 hal.17 \_ 18
- Sherman, Kent. (1965). ‘*Strategic Intelligence For The American Policy*’, Archon Books, Hamden, Connecticut.
- Simon, Sheldon W. (2011) *Safety and Security in the Malacca Straits: The Limits of Collaboration*. Asian Security
- Soegirman, S. (2012). *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*. Jakarta: Media Bangsa.
- Sukarnaprawira, AA Kustia. (2007). *Intelijen Dilema dan Tantangan*. CSICI: Jakarta
- Sukarno, Irawan. (2011). *Aku Tiada Aku Niscaya Menyingkap Lapis Kabut Intelijen*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Till, Geoffrey. (2018). *Seapower A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge: London.